

Katalog: 9302020.3276

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK MENURUT PENGELUARAN

2018-2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK MENURUT PENGELUARAN

2018-2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK

MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022

*Gross Regional Domestic Product of Depok Municipality
by Expenditure 2018 - 2022*

Nomor ISSN : 2808-0319

Nomor Publikasi/Publication Number : 32760.2308

Katalog/Catalog : 9302020.3276

Ukuran Buku/Book Size : 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages : xvi + 65 halaman

Naskah/Manuscript :

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Penyunting/Editor:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Penerbit/Published by:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Pencetak/Printed by:

Badan Pusat Statistik Kota Depok/BPS-Statistics Depok Municipality

Sumber Ilustrasi/Graphics by:

Annisa Kusumasari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA DEPOK
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

Penanggung Jawab Umum :
Erwin Subarkah, S.Kom

Penanggung Jawab Teknis :
Ika Widyastuti , S.ST

Editor :
Ika Widyastuti , S.ST

Penulis dan Pengolah Data :
Annisa Kusumasari, S.ST

Tata Letak dan Infografis :
Annisa Kusumasari, S.ST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal ini Kota Depok.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh pihak yang telah saling membantu dan bekerjasama dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Depok, April 2023
An. Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Depok
Kasubbag Umum,

Erwin Subarkah, S.Kom

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	13
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	15
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	17
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5. Perubahan Inventori (PI)	22
2.6. Ekspor Impor	24
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA DEPOK MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018-2022.....	27
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	37
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	43
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	45
3.2.5. Perubahan Inventori	46
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa	47

BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA DEPOK	49
4.1. PDRB (Nominal)	51
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	52
 BAB V PENUTUP	 53
 LAMPIRAN	 57
 DAFTAR PUSTAKA	 65

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022	30
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022	31
Tabel 3. Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022	33
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022	35
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok, Tahun 2018-2022	36
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Depok Tahun 2018-2022	38
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok, Tahun 2018-2022	40
Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Depok , Tahun 2018-2022	41
Tabel 9. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRK Kota Depok, Tahun 2018-2022	42
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok, Tahun 2018-2022	44
Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok Tahun 2018-2022	46
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, 2018 – 2022	46

Tabel 13. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kota Depok, 2018-2022 52

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022.....	30
Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022.....	32
Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022.....	33
Grafik 4. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022.....	35

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022	59
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022	60
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022	61
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022	62
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022 ..	63
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022	64

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

Chapter I Introduction

Komponen PDRB menurut Pengeluaran

01. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
02. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
03. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
04. Pembentukan Modal Tetap Bruto
05. Perubahan Inventori
06. Net Expor Antar Daerah

<https://depokkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi

investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir)

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Depok menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada

tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

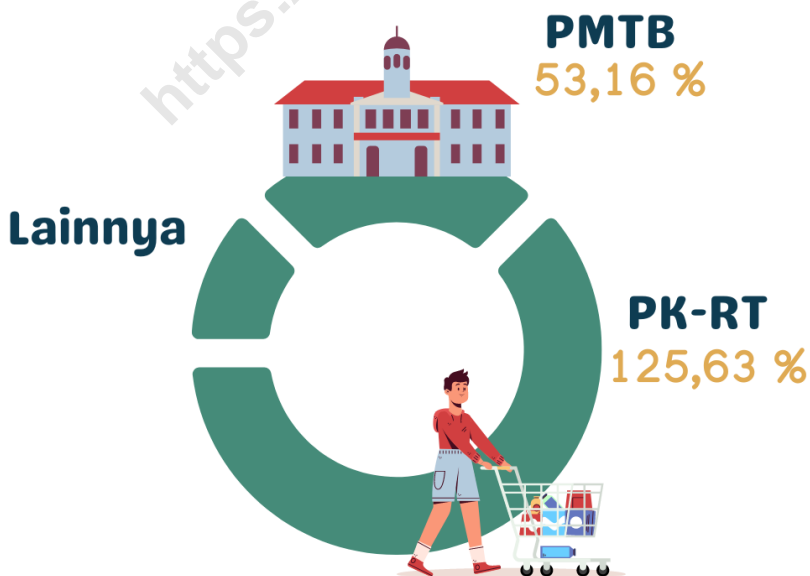
Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Chapter II Estimation Method
and Data Source

Distribusi PDRB menurut
Pengeluaran, Depok, 2022



<https://depokkota.bps.go.id>

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);

7. Nilai PK-RT' atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran

LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan

barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Depok mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kota Depok mencakup:

- a. PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kota Depok ;
- b. PK-P Kota Depok yang bersangkutan;
- c. PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Depok.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Depok tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Badan Keuangan Daerah
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Badan Keuangan Daerah
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kota Depok Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku =
Output - Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind*
purchased market production + **Output Bank Indonesia**

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
1. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta

pengecahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate*

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply

Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) =
PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian

- BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
 5. Data komoditas perkebunan;
 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
 8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6. EKSPOR - IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar

wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kota Depok terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kota Depok
- b. Impor dari luar Kota Depok .

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Depok didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Depok diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB III TINJAUAN EKONOMI DEPOK

Chapter III Economic Review of
Depok

Laju Pertumbuhan PDRB
menurut Pengeluaran, 2022

5,24%



Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga

4,12%



Pengeluaran Konsumsi
LNPRT

3,95%



Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

0,11%



Pembentukan Modal
Tetap Bruto

1,68%



Net Expor Antar Daerah

1,46%

<https://depokkota.bps.go.id>

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Pengeluaran Kota Depok atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2022 meningkat sebesar 9,12 %, yakni dari 74.382,3 miliar Rupiah menjadi 81.166,75 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka peningkatannya lebih riil karena tidak terpengaruh faktor inflasi, yakni dari 49.947,24 miliar Rupiah (2010=100) meningkat sebesar 5,24% menjadi 52.564,98 miliar Rupiah (2010=100).

Selama tahun 2018-2019 di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Depok periode 2018 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 6 % yakni sebesar 6,94 % dan 6,74 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,92 persen sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 selama tahun 2020. Selanjutnya, pada 2021-2022 kondisi perekonomian mulai membaik sehingga Kota Depok mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,76 % dan 5,24 %.

Perkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Depok pada periode 2018 – 2022 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Gambar 1. Pada periode tahun 2018 - 2019 PDRB Kota Depok atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 64.363,24 miliar Rupiah (2018) dan 70.964,04 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu menjadi sebesar 70.386,33 miliar Rupiah. Hal ini dikarenakan penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Selanjutnya, pada 2021-2022 PDRB Kota Depok kembali mengalami peningkatan menjadi 74.382,34 dan 81.166,75 miliar Rupiah. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas

masyarakat dan penguatan kinerja perekonomian global mendorong perekonomian Kota Depok.

Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

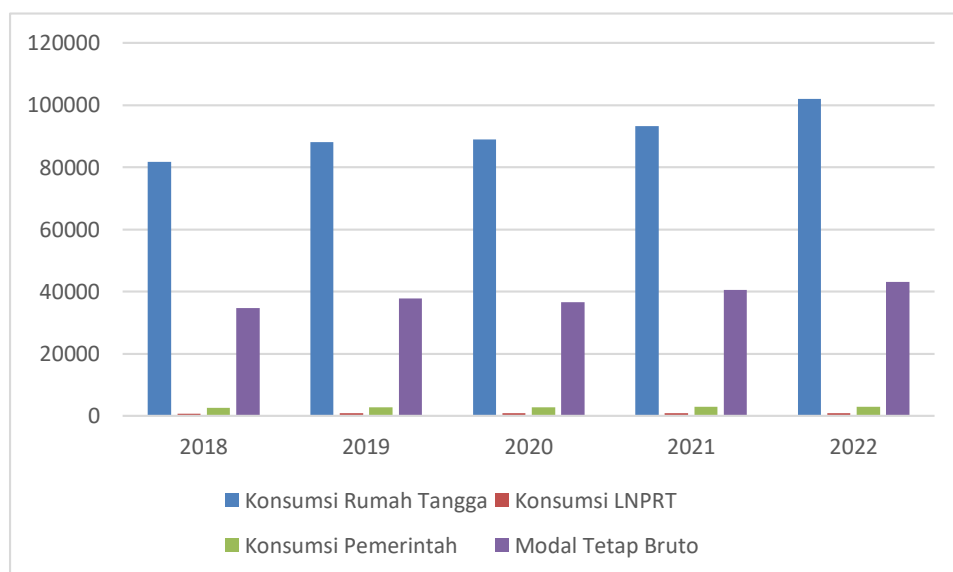
(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	81.801,44	88.139,38	88.960,30	93.264,93	101.971,97
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	728,74	778,18	793,97	823,07	886,17
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	2.588,60	2.693,75	2.721,71	2.836,28	2.914,56
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	34.603,77	37.755,45	36.626,32	40.465,54	43.144,95
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>					
6 Ekspor / <i>Export</i>					
7 Impor / <i>Import</i>					
PDRB / GRDP	64.363,24	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75

Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Grafik 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018 - 2022



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Depok pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran / Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	57.983,05	60.765,07	60.319,01	61.985,75	64.542,27
2 Konsumsi LNPRT / NPISH Consumption	508,71	524,66	524,74	535,13	556,28
3 Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	1.628,96	1.685,29	1.671,66	1.698,59	1.700,51
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	23.947,91	25.214,42	24.317,22	25.677,32	26.108,54
5 Perubahan Inventori / Changes of Inventory					
6 Ekspor / Export					
7 Impor / Import					
PDRB / GRDP	45.978,89	49.076,58	48.135,93	49.947,24	52.564,98

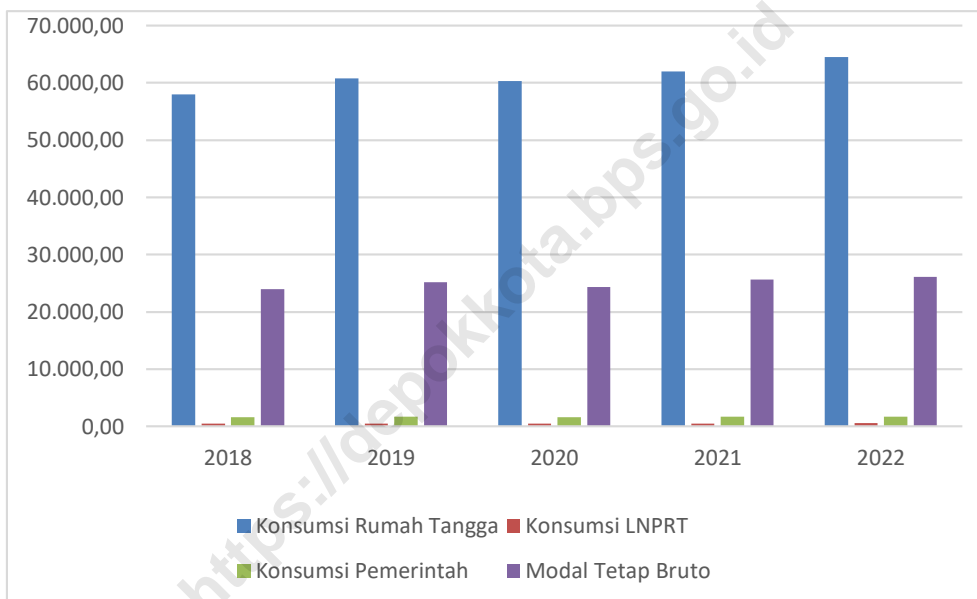
Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Depok meningkat dari tahun 2018-2019, yakni sebesar 45,978.89 miliar Rupiah menjadi 49,076.58 miliar Rupiah. Sementara itu, pada tahun 2020

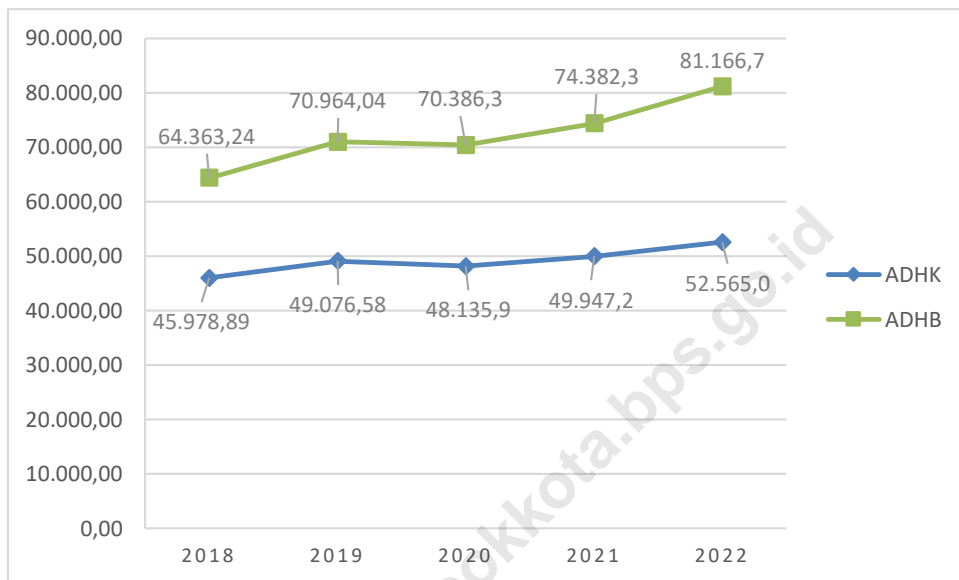
terjadi penurunan karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebesar 48,135.9 miliar Rupiah. Selanjutnya, pada 2021-2022 kembali terjadi peningkatan menjadi sebesar 49,947.2 miliar Rupiah dan 52,565.0 miliar Rupiah karena kondisi perekonomian yang berangsur membaik.

Grafik 2 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018 - 2022



Dari Grafik 3, dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Grafik 3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022



Tabel 3 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

(%)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	127.09	124.20	126.39	125.39	125.63
2 Konsumsi LNPRT / <i>NPISH Consumption</i>	1.13	1.10	1.13	1.11	1.09
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	4.02	3.80	3.87	3.81	3.59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	53.76	53.20	52.04	54.40	53.16
5 Perubahan Inventori <i>/Changes of Inventory</i>					
6 Ekspor / <i>Export</i>					
7 Impor / <i>Import</i>					
PDRB / GRDP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kota Depok, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni berkisar pada angka 50-55 persen.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 3 – 5 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam pembentukan PDRB sangat kecil dan tidak begitu dominan. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Sementara itu, komponen konsumsi LNPRT menurun selama tiga tahun terakhir, yaitu dari 1,13 persen pada 2020 menjadi 1,09 persen pada 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan sosial sehingga terjadi penurunan aktivitas LNPRT yang berimbas terhadap penurunan pengeluaran. Selain itu, tahun 2020 dan 2022 juga bukan merupakan tahun politik bagi Kota Depok sehingga partai politik tidak banyak melakukan kegiatan.

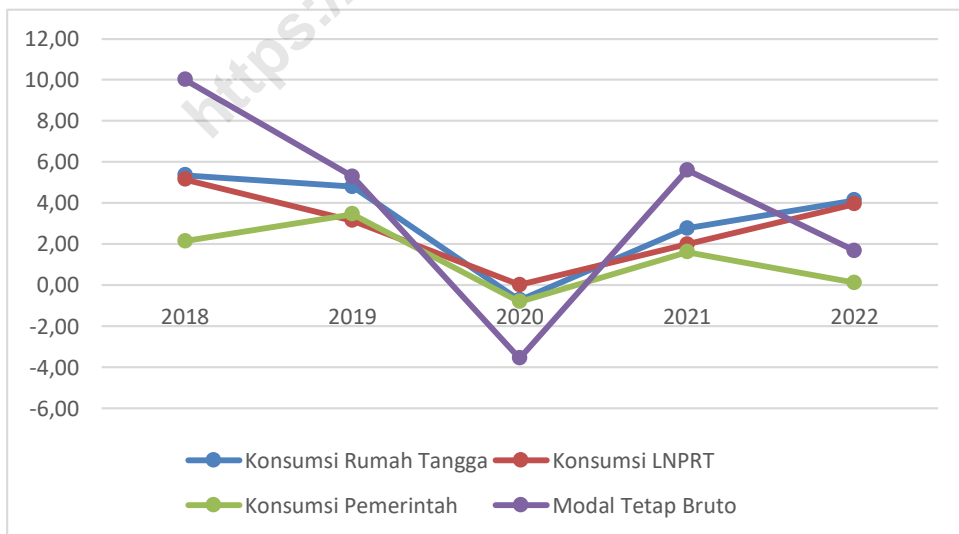
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2018 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami peningkatan, yakni sebesar 6,97 persen (2018); dan 6,74 persen (2019). Sedangkan pada tahun 2020 Kota Depok mengalami kontraksi sebesar -1,92 persen. Selanjutnya, pada 2021-2022 pertumbuhan ekonomi Kembali meningkat menjadi 3,76 persen dan 5,24 persen karena kondisi perekonomian yang mulai pulih.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran / <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	5.36	4.80	-0.73	2.76	4.12
2 Konsumsi LNPRIT / <i>NPISH Consumption</i>	5.14	3.14	0.01	1.98	3.95
3 Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	2.14	3.46	-0.81	1.61	0.11
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	10.01	5.29	-3.56	5.59	1.68
5 Perubahan Inventori / <i>Changes of Inventory</i>					
6 Net Impor / <i>Net Import</i>					
PDRB / GRDP	6.97	6.74	-1.92	3.76	5.24

Keterangan: *) angka sementara
*) angka sangat sementara

Grafik 4 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018 - 2022



Dari Grafik 4 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama. Berdasarkan Grafik 4 terlihat bahwa pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2022 adalah Konsumsi Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya kasus covid-19 pada 2022

sehingga perekonomian mulai bangkit dan aktivitas serta mobilitas pelaku rumah tangga mengalami peningkatan, akibatnya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Komponen yang terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir adalah konsumsi (LNPRT). Hal ini karena pada masa pandemi covid banyak bantuan yang diberikan oleh lembaga non profit sehingga terjadi peningkatan konsumsi LNPRT. Sementara itu, pertumbuhan terendah adalah konsumsi pemerintah yaitu sebesar 0,11 persen. Hal ini terjadi karena masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat pada tahun 2022 sehingga kegiatan pemerintah belum berjalan seperti semula.

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018 – 2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran / Expenditure item	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption	141,08	145,05	147,48	150,46	157,99
2 Konsumsi LNPRT / NPISH Consumption	143,25	148,32	151,31	153,81	159,30
3 Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	158,91	159,84	162,82	166,98	171,39
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	144,50	149,74	150,62	157,59	165,25
5 Perubahan Inventori / Changes of Inventory					
6 Net Impor / Net Import					
PDRB / GRDP	139,98	144,60	146,22	148,92	154,41

Keterangan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Depok untuk periode 2018 – 2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Depok ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Depok maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Akan tetapi, pada tahun 2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan. Hal ini

dikarenakan adanya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya, pada 2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga kembali mengalami peningkatan karena kasus covid-19 mulai berkurang sehingga perekonomian secara umum mulai bergeliat. Demikian juga pada tahun 2022 pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Pada masa percepatan pertumbuhan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 6 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Depok Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga / Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)	81.801,44	88.139,38	88.960,30	93.264,93	101.971,97
b. ADHK 2010 / 2010 Constant Prices (Miliar Rp/Trillion Rp)	57.983,05	60.765,07	60.319,01	61.985,75	64.542,27
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	127,09	124,20	126,39	125,39	125,63
Rata-rata konsumsi per-Kapita per tahun / Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	35.102,89	37.359,12	43.424,24	44.711,33	48.024,12
b. ADHK 2010/ 2010 Constant Prices (Ribu Rp/Thousand Rp)	24.881,87	25.756,14	29.443,55	29.716,05	30.396,44
Pertumbuhan/Growth ⁷ Total konsumsi RT/ Total of Household Consumption	5,36	4,80	-0,73	2,76	4,12
Jumlah penduduk / Number of population (orang/person)	2.254.513	2.330.333	2.359.246	2.048.632	2.085.935

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, setiap orang di Kota Depok secara rata-rata membelanjakan uang sekitar Rp 43.424.248,- setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut berturut-turut meningkat menjadi Rp 44.711.330,- (2021); dan pada tahun 2022 menjadi Rp 48.024.122,-. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per kapita selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Depok,
Tahun 2018 - 2022**

Kelompok Konsumsi / <i>Consumption group</i>	(%)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol/ <i>Food and non alcoholic beverages</i>	24,54	25,64	26,02	26,75	27,00
b. Minuman Beralkohol dan Rokok / <i>Alcoholic beverages and tobacco</i>	5,45	5,41	5,52	5,37	5,45
c. Pakaian / <i>Clothing</i>	2,54	2,53	2,45	2,26	2,26
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar / <i>Housing, water, electricity, Gas and fuel</i>	6,01	5,83	5,83	5,74	5,77
e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah / <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	3,38	3,29	3,16	3,12	3,10
f. Kesehatan / <i>Health</i>	2,31	2,36	2,45	2,41	2,23
g. Transportasi / <i>Transportation</i>	24,36	23,73	22,67	22,41	22,94
h. Komunikasi / <i>Communication</i>	4,84	4,77	5,06	5,21	5,00
i. Rekreasi, dan Budaya / <i>Recreation and culture</i>	6,04	5,80	5,50	5,37	5,03
j. Pendidikan / <i>education</i>	4,63	4,67	4,96	4,97	4,90
k. Hotel & Akomodasi / <i>Hotels, and accomodation</i>	12,37	12,43	12,78	12,83	12,84
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan / <i>Miscellaneous goods and services</i>	3,52	3,53	3,59	3,56	3,48
Total Konsumsi / <i>Total of consumption</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur komponen konsumsi rumah tangga Kota Depok pada periode tahun 2018-2022 tidak banyak mengalami perubahan. Konsumsi rumah tangga di Kota Depok yang terbesar masih untuk makanan, dan minuman non alkohol, transportasi, serta Hotel & Akomodasi. Nilai konsumsi masyarakat Kota Depok untuk ketiga jenis kelompok konsumsi tersebut mencapai 62,78 persen pada tahun 2022.

**Tabel 8 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga)
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Depok, Tahun 2018 - 2022**

	(%)				
Kelompok Konsumsi / Consumption group	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol/ <i>Food and non alcoholic beverages</i>	2,65	5,01	1,06	2,65	7,31
b. Minuman Beralkohol dan Rokok / <i>Alcoholic beverages and tobacco</i>	6,80	3,84	1,97	0,71	6,62
c. Pakaian / <i>Clothing</i>	3,98	2,97	1,41	-1,07	-0,26
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar / <i>Housing, water, electricity, Gas and fuel</i>	1,66	-0,51	0,23	0,14	4,67
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah / <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	2,94	2,87	3,75	2,77	5,31
f. Kesehatan / <i>Health</i>	2,01	3,04	2,02	0,65	1,28
g. Transportasi / <i>Transportation</i>	5,66	1,92	1,30	1,93	5,36
h. Komunikasi / <i>Communication</i>	0,02	0,98	-0,97	-0,10	0,00
i. Rekreasi, dan Budaya / <i>Recreation and culture</i>	2,98	-0,08	1,35	0,67	2,35
j. Pendidikan / <i>education</i>	6,03	6,05	3,02	1,88	3,03
k. Hotel & Akomodasi / <i>Hotels, and accomodation</i>	2,94	1,99	3,87	4,19	4,72
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan / <i>Miscellaneous goods and services</i>	1,89	1,96	3,74	1,66	4,73
Total Konsumsi / Total of consumption	3,69	2,81	1,68	2,02	5,01

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan pada Tabel 8, menunjukkan variasi setiap tahunnya pada masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2022 kelompok konsumsi yang mengalami peningkatan harga tertinggi adalah Makanan dan minuman non Beralkohol, sedangkan untuk kelompok Pakaian mengalami kontraksi walaupun tidak signifikan.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Depok Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT	728,74	778,18	793,97	823,07	886,17
a ADHB (Milyar Rp)					
b ADHK 2010 (Milyar Rp)	508,71	524,66	524,74	535,13	556,28
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,13	1,10	1,13	1,11	1,09
Pertumbuhan (ADHK 2010)	5,14	3,14	0,01	1,98	3,95

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 728,74 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 778,18 miliar rupiah (2019); 793,97 miliar rupiah (2020); 823,07 miliar rupiah (2021); dan 886,17 miliar rupiah (2022). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 5,14 persen (2018); 3,14 persen (2019); 0,01

persen (2020); 1,98 persen (2021), dan 3,95 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 karena adanya persiapan Pilpres 2019.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah :

- a. *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- b. *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).
- c. *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri :

- a. *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
- b. *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan, sedangkan atas dasar harga konstan 2010, pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 walaupun setelah itu kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022.

Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.588,60 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.693,75 miliar rupiah (2019), 2.721,71 miliar rupiah

(2020), 2.836,28 miliar rupiah (2021) dan 2.914,56 miliar rupiah (2022). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2018 sebesar 1.628,96 miliar rupiah, pada tahun 2019 sebesar 1.685,29 miliar rupiah, pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 1.671,66 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 1.698,59 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 menjadi 1.700,51 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas walaupun dengan range pertumbuhan yang tidak terlalu lebar.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB Kota Depok pada kurun waktu 2018-2022 juga mengalami fluktuasi dengan range yang sangat sempit dari 3,59 sd 4,02 persen, berikut ini rincian per tahunnya, dari 4,02 persen pada tahun 2018, turun menjadi 3,80 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi 3,87 persen, kemudian pada tahun 2021 menjadi 3,81 persen, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 3,59 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,59 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,02 persen.

Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Depok Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a ADHB (Miliar Rp)	2.588,60	2.693,75	2.721,71	2.836,28	2.914,56
b ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.628,96	1.685,29	1.671,66	1.698,59	1.700,51
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	4,02	3,80	3,87	3,81	3,59
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp) Kapita					
a ADHB	1.110,83	1.141,78	1.328,55	1.359,72	1.372,62
b ADHK 2010	699,03	714,33	815,99	814,31	800,86
Pertumbuhan (%)					
Total konsumsi pemerintah	2,14	3,46	-0,81	1,61	0,11
Jumlah penduduk (orang)	2.330.333	2.359.246	2.048.632	2.085.935	2.123.349

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.110,83 juta rupiah terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.141,78 juta rupiah (2019); 1.328,55 juta rupiah (2020); 1.359,72 rupiah (2021) dan mencapai 1.372,62 rupiah pada tahun 2022.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 dan 2022, dengan masing-masing senilai 699,03 ribu rupiah (2018); 714,33 ribu rupiah (2019); 815,99 ribu rupiah (2020); 814,31 ribu rupiah (2021); dan 800,86 ribu rupiah (2022). Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,14 persen (2018) dan naik sebesar 3,46 persen (2019). Kemudian pada tahun tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita turun sebesar -0,81 persen (2020); dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 1,61 persen dan 0,11 persen

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018 – 2022 berfluktuasi dari 10,01 persen (2018) menjadi 5,29 persen (2019), sementara di tahun lainnya masing-masing -3,56 persen (2020); 5,59 persen (2021) dan 1,68 persen (2022). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021, hal ini disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur di Kota Depok.

**Tabel 11 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Depok
Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	34.603,77	37.755,45	36.626,32	40.465,54	43.144,95
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	23.947,90	25.214,41	24.317,21	25.677,32	26.108,53
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	53,76	53,20	52,04	54,40	53,16
Struktur PMTB⁹					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	28.630,70	31.763,87	31.183,64	34.553,86	36.502,09
(%)	82,74	84,13	85,14	85,39	84,60
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	5.973,06	5.991,58	5.442,68	5.911,68	6.642,86
(%)	17,26	15,87	14,86	14,61	15,40
Total PMTB					
(<i>Miliar Rp</i>)	34.603,77	37.755,45	36.626,32	40.465,54	43.144,95
(%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan¹⁰ (%)					
a. Bangunan	10,11	6,97	-2,36	5,61	0,59
b. Non Bangunan	9,54	-2,92	-9,97	5,48	8,03
Total PMTB	10,01	5,29	-3,56	5,59	1,68

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Depok, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

Chapter IV aggregate
development of PDRB

PDRB per Kapita Depok

Nominal PDRB
ADHB/ ADHK



Ribu Rupiah
1372,62
PDRB Per
Kapita Depok,
ADHB, 2022

Juml Penduduk
Kota Depok



Ribu Rupiah
800,86
PDRB Per
Kapita Depok,
ADHK, 2022

<https://depokkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Selain dianalisis secara deskriptif terhadap nominal PDRB, dapat juga dilakukan analisis proporsi pengeluaran konsumsi akhir terhadap PDRB, *Average Propensity To Consume* (APC) dan *Average Propensity To Save* (APS), serta analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Analisis turunan lanjutan dari PDRB yang bisa dilakukan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi pendukung yang ada.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Depok di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kota Depok, 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	64.363,24	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75
- ADHK 2010	45.978,89	49.076,58	48.135,93	49.947,24	52.564,98
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	27.619,76	30.079,12	34.357,72	35.658,99	38.225,82
- ADHK 2010	19.730,61	20.801,81	23.496,62	23.944,77	24.755,69
Jumlah penduduk (orang)	2.330.333	2.359.246	2.048.632	2.085.935	2.123.349

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 14 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Depok, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)	85.118,78	91.611,30	92.475,99	96.924,28	105.772,71
a Rumah Tangga	81.801,44	88.139,38	88.960,30	93.264,93	101.971,97
b LNPRT	728,74	778,18	793,97	823,07	886,17
c Pemerintah	2.588,60	2.693,75	2.721,71	2.836,28	2.914,56
PDRB ADHB (Miliar Rp)	64.363,24	70.964,04	70.386,3	74.382,3	81.166,7
Proporsi	132,25	129,10	131,38	130,31	130,32

Keterangan: *) angka sementara

*) angka sangat sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2018 sampai dengan 2022, nilai total konsumsi akhir selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai PDRB nya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Depok melakukan impor barang dan jasa yang dikonsumsinya.

BAB V PENUTUP

Chapter V Closing

<https://depokkota.bps.go.id>

<https://depokkota.bps.go.id>

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 sd 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Depok pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 sd 2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran ini, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

LAMPIRAN

<https://depokkota.bps.go.id>

<https://depokkota.bps.go.id>

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	81.801,44	88.139,38	88.960,30	93.264,93	101.971,97
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	20.073,13	22.594,72	23.147,07	24.952,06	27.529,46
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	4.457,37	4.766,99	4.908,49	5.006,67	5.556,70
c. Pakaian	2.081,06	2.229,21	2.183,60	2.111,33	2.306,30
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4.918,97	5.141,76	5.190,20	5.350,40	5.880,90
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2.768,88	2.898,16	2.811,86	2.907,10	3.164,10
f. Kesehatan	1.889,43	2.084,30	2.182,16	2.247,40	2.273,31
g. Transportasi	19.927,59	20.917,18	20.169,95	20.901,84	23.394,28
h. Komunikasi	3.958,32	4.206,13	4.504,39	4.861,05	5.100,03
i. Rekreasi, dan Budaya	4.940,75	5.115,01	4.890,61	5.011,76	5.124,70
j. Pendidikan	3.787,65	4.113,69	4.408,60	4.636,43	5.000,64
k. Hotel & Akomodasi	10.115,22	10.956,82	11.368,40	11.962,48	13.097,42
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	2.883,08	3.115,40	3.194,99	3.316,43	3.544,12
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	728,74	778,18	793,97	823,07	886,17
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.588,60	2.693,75	2.721,71	2.836,28	2.914,56
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	34.603,77	37.755,45	36.626,32	40.465,54	43.144,95
4 a Bangunan	28.630,70	31.763,87	31.183,64	34.553,86	36.502,09
4 b Non Bangunan	5.973,06	5.991,58	5.442,68	5.911,68	6.642,86
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	64.363,24	70.964,04	70.386,33	74.382,34	81.166,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Depok Tahun 2018-2022

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	57.983,05	60.765,07	60.319,01	61.985,75	64.542,27
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	11.900,89	12.756,31	12.930,62	13.578,56	13.961,10
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.657,06	2.736,64	2.763,53	2.799,00	2.913,74
c. Pakaian	1.720,25	1.789,61	1.728,65	1.689,52	1.850,42
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3.405,85	3.578,21	3.603,74	3.709,80	3.895,68
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2.182,07	2.220,21	2.076,22	2.088,79	2.158,78
f. Kesehatan	1.425,57	1.526,28	1.566,23	1.602,62	1.600,56
g. Transportasi	13.223,82	13.619,43	12.964,38	13.180,65	14.001,55
h. Komunikasi	3.725,26	3.920,19	4.239,47	4.579,64	4.804,75
i. Rekreasi, dan Budaya	4.306,41	4.461,80	4.209,07	4.284,79	4.280,55
j. Pendidikan	2.847,27	2.916,06	3.033,56	3.131,54	3.278,05
k. Hotel & Akomodasi	8.343,81	8.861,25	8.851,69	8.939,47	9.346,86
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	2.244,77	2.379,09	2.351,85	2.401,35	2.450,22
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	508,71	524,66	524,74	535,13	556,28
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.628,96	1.685,29	1.671,66	1.698,59	1.700,51
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.947,91	25.214,42	24.317,22	25.677,32	26.108,54
4 a Bangunan	19.870,13	21.255,51	20.752,99	21.917,78	22.047,29
4 b Non Bangunan	4.077,78	3.958,91	3.564,23	3.759,54	4.061,25
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	45.978,89	49.076,58	48.135,93	49.947,24	52.564,98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	127,09	124,20	126,39	125,39	125,63
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	31,19	31,84	32,89	33,55	33,92
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	6,93	6,72	6,97	6,73	6,85
c. Pakaian	3,23	3,14	3,10	2,84	2,84
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	7,64	7,25	7,37	7,19	7,25
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,30	4,08	3,99	3,91	3,90
f. Kesehatan	2,94	2,94	3,10	3,02	2,80
g. Transportasi	30,96	29,48	28,66	28,10	28,82
h. Komunikasi	6,15	5,93	6,40	6,54	6,28
i. Rekreasi, dan Budaya	7,68	7,21	6,95	6,74	6,31
j. Pendidikan	5,88	5,80	6,26	6,23	6,16
k. Hotel & Akomodasi	15,72	15,44	16,15	16,08	16,14
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	4,48	4,39	4,54	4,46	4,37
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,10	1,13	1,11	1,09
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,02	3,80	3,87	3,81	3,59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	53,76	53,20	52,04	54,40	53,16
4 a Bangunan	44,48	44,76	44,30	46,45	44,97
4 b Non Bangunan	9,28	8,44	7,73	7,95	8,18
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	5,36	4,80	-0,73	2,76	4,12
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	7,17	7,19	1,37	5,01	2,82
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	5,23	3,00	0,98	1,28	4,10
c. Pakaian	5,14	4,03	-3,41	-2,26	9,52
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,43	5,06	0,71	2,94	5,01
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,15	1,75	-6,49	0,61	3,35
f. Kesehatan	4,43	7,06	2,62	2,32	-0,13
g. Transportasi	4,21	2,99	-4,81	1,67	6,23
h. Komunikasi	3,46	5,23	8,14	8,02	4,92
i. Rekreasi, dan Budaya	5,77	3,61	-5,66	1,80	-0,10
j. Pendidikan	4,63	2,42	4,03	3,23	4,68
k. Hotel & Akomodasi	5,72	6,20	-0,11	0,99	4,56
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	6,82	5,98	-1,15	2,10	2,03
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,14	3,14	0,01	1,98	3,95
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,14	3,46	-0,81	1,61	0,11
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,01	5,29	-3,56	5,59	1,68
4 a Bangunan	10,11	6,97	-2,36	5,61	0,59
4 b Non Bangunan	9,54	-2,92	-9,97	5,48	8,03
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Depok, 2018-2022

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	141,08	145,05	147,48	150,46	157,99
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	168,67	177,13	179,01	183,76	197,19
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	167,76	174,19	177,62	178,87	190,71
c. Pakaian	120,97	124,56	126,32	124,97	124,64
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	144,43	143,70	144,02	144,22	150,96
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	126,89	130,54	135,43	139,18	146,57
f. Kesehatan	132,54	136,56	139,33	140,23	142,03
g. Transportasi	150,69	153,58	155,58	158,58	167,08
h. Komunikasi	106,26	107,29	106,25	106,14	106,15
i. Rekreasi, dan Budaya	114,73	114,64	116,19	116,97	119,72
j. Pendidikan	133,03	141,07	145,33	148,06	152,55
k. Hotel & Akomodasi	121,23	123,65	128,43	133,82	140,13
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	128,44	130,95	135,85	138,11	144,65
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	143,25	148,32	151,31	153,81	159,30
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	158,91	159,84	162,82	166,98	171,39
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	144,50	149,74	150,62	157,59	165,25
4 a Bangunan	144,09	149,44	150,26	157,65	165,56
4 b Non Bangunan	146,48	151,34	152,70	157,24	163,57
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	139,98	144,60	146,22	148,92	154,41

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Depok 2018-2022

(Persen)

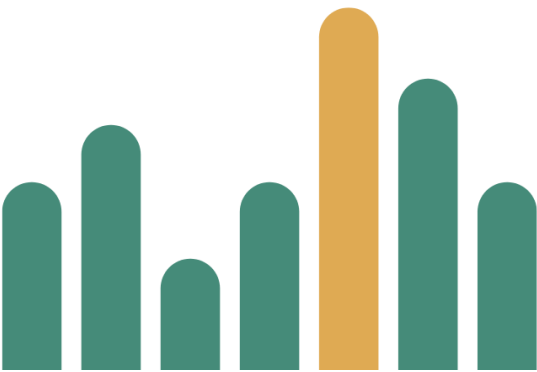
KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1 a s/d 1 l)	3,69	2,81	1,68	2,02	5,01
a. Makanan dan Minumam Non Beralkohol	2,65	5,01	1,06	2,65	7,31
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	6,80	3,84	1,97	0,71	6,62
c. Pakaian	3,98	2,97	1,41	-1,07	-0,26
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,66	-0,51	0,23	0,14	4,67
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,94	2,87	3,75	2,77	5,31
f. Kesehatan	2,01	3,04	2,02	0,65	1,28
g. Transportasi	5,66	1,92	1,30	1,93	5,36
h. Komunikasi	0,02	0,98	-0,97	-0,10	0,00
i. Rekreasi, dan Budaya	2,98	-0,08	1,35	0,67	2,35
j. Pendidikan	6,03	6,05	3,02	1,88	3,03
k. Hotel & Akomodasi	2,94	1,99	3,87	4,19	4,72
l. Barang Pribadi dan Jasa Perseorangan	1,89	1,96	3,74	1,66	4,73
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,37	3,54	2,02	1,65	3,57
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,86	0,58	1,86	2,56	2,64
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,92	3,63	0,59	4,63	4,86
4 a Bangunan	3,62	3,71	0,55	4,92	5,02
4 b Non Bangunan	5,35	3,32	0,90	2,97	4,02
5 Perubahan Inventori					
6 Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,01	3,30	1,12	1,84	3,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://depokkota.bps.go.id>



<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Depok 16413

Telp : (021)7710370, Fax: (021)778250913

Email : bps3276@bps.go.id

Homepage : <https://depokkota.bps.go.id>